

**ANALISIS EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
(TAHUN ANGGARAN 2014-2015)**

*ANALYSIS EFFECTIVENESS OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF EAST
BOLAANG MONGONDOW GOVERNMENT'S
(IN 2014-2015 FISCAL YEAR)*

Oleh :
Memey Manoppo¹
Ventje Ilat²
Victorina Z. Tirayoh³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115. Indonesia

Email : ¹memeymanoppo09@gmail.com
²ventjeilat@yahoo.com
³vtirayoh@yahoo.com

Abstrak: Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai pihak yang ditugasi menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan *clean government*, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan menerapkan kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun anggaran 2014-2015 telah efektif. Objek Penelitian ini Adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2014-2015 sudah bisa dikatakan efektif karena sudah mencapai kisaran persentase diatas 90%. Selama periode 2014-2015 pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 0,8% di tahun 2015. Tahun 2014 jumlah persentase sebesar 96,89% dan tahun 2015 sebesar 97,69%. Sedangkan Selama periode 2014-2015 tingkat efektifitas belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,69% di tahun 2015. Persentase tahun 2014 sebesar 93,96% dan tahun 2015 sebesar 94,65%.

Kata Kunci : *anggaran pendapatan dan belanja daerah, efektif*

Abstract: Bolaang Mongondow Timur Regional Budget and Expenditure (hereinafter APBD) is one of budgetary documents in Indonesian regional governments which has to be approved by the Regional House of Representatives. Bolaang Mongondow Timur Government which is mandated to execute governmental and developmental tasks, must do so with robust budgetary management that stays within the budgetary guidelines in order to achieve the objective of clean governance, whereas good budgetary management signifies the ability to create efficient, transparent and accountable regional fiscal policies. The aim of this research is to asses the effectiveness of Bolaang Mongondow Timur Government's 2014 - 2015 Budget and Expenditure. The object of this research is the Regional Finance Departement of Bolaang Mongondow Timur. The research uses descriptive method. The data used for the research are both qualitative and quantitative. The research get the data from both primary and secondary sources. It will be argued that realization of Bolaang Mongondow Timur Government's Budget and Expenditure during 2014 - 15 fiscal year has been moderately effective because the absorbtion rate has been over 90 percent. During the 2014 -15 fiscal year the region had seen an increase in regional income as high as 0,8 percent, this was calculated in 2015. Budget Absorbition Rate in 2015 was recorded at 96.89 percent whereas in 2015 it was recorded at 97.69 percent. The research suggests that there have been 0.69 percent increase in regional budget and expenditure effectiveness troughout the one year period. The presentage (of who knows what) in 2014 was 93.96 percent whereas in 2015 it was 94.65 percent.

Keywords: *regional budget and expenditure, effectiveness*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Perkembangan suatu negara untuk lebih maju dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan taat pada peraturan dalam rangka bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Sistem pemerintahan yang semula tersentralisasi di pemerintah pusat secara bertahap dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam melakukan manajemen pemerintahan di daerah. Salah satu masalah yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Anggaran pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Perkembangan porsi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun selalu meningkat. Komposisi sumber dana APBD terdiri atas pendapatan asli daerah dan transfer dana dari pemerintah pusat sebagai wujud dana perimbangan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan kabupaten yang masih relatif mudah, namun Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang sebelumnya merupakan bagian dari Bolaang Mongondow Induk, ini sudah berbenah diri dan saat ini mempunyai segudang tugas dan tantangan dalam mengembangkan pembangunan dimasa yang akan datang. Pemerintah yang ada terus menata penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Oleh karena itu penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Pada tahun 2014 Anggaran Pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp.395.532.306.935,00 yang diperoleh dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian tingkat realisasi anggaran pendapatan tersebut sebesar Rp.382.277.320.381,86 dengan jumlah persentase sebesar 96,89%. Melihat antusias dan tekad dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Tahun Anggaran 2014-2015).

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apakah Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2014 dan 2015 telah Efektif.

TINJAUAN PUSTAKA**Pengertian Akuntansi**

Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi proses dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut laporan keuangan. Dilihat dari segi fungsinya akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari

suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi akuntansi pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba, sedangkan menurut *International federation of Accountants (IFAC)*, yang dimaksud dengan “sektor publik” mengacu pada pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan lokal, dan unit pemerintahan yang terkait.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu :

1. Pertanggungjawaban
2. Manajerial
3. Pengawasan

Pemerintah mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan sistem akuntansi pemerintahan. Prinsip dan standar akuntansi serta pelaporan harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan tempat prinsip itu diterapkan.

Government Finance Officers Association mengemukakan bahwa untuk dapat memahami model akuntansi pemerintahan dengan tepat diperlukan pemahaman mengenai tiga hal sebagai berikut :

1. Struktur Pemerintahan
2. Struktur Pemerintahan
3. Proses Politik

Karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan akuntansi dana (*fund*), “dana” di sini adalah satuan akuntansi dan fiskal (*fiscal and accounting entity*) dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas, sumber-sumber keuangan selain kas, kewajiban-kewajiban, sisa atau saldo modal beserta perubahan-perubahannya yang dipisahkan untuk melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai kegiatan tertentu.
- b. Tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan, karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut, nilai budaya, tradisi, dan faktor-faktor lainnya.

Teori Anggaran

Istilah anggaran secara etimologis berasal dari bahasa latin *budga* atau *budge* (bahsa Inggris) dan *etat de roi, bougette/bouge* (Perancis), dalam bahasa Belanda, disebut *begroting (groten)*, yang bisa diartikan memperkirakan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Anggaran Operasional, anggaran akan digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi. Belanja operasi tidak untuk menambah aktiva dan masa manfaatnya hanya satu periode.
2. Anggaran Modal, anggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan aktiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk menunjang aktivitas organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Belanja Modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang keuangan negara. Dalam hal penyusunan kementerian yang menangani urusan pemerintahan perencanaan pembangunan dan yang menangani urusan keuangan membuat pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya. APBD merupakan rencana pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan untuk satu tahun. APBD juga merupakan wujud tahunan dari rencana jangka panjang daerah serta rancangan menengah yang dibuat dari visi misi kepala daerah. APBD dipersiapkan oleh pemerintah daerah, dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga pada akhirnya merupakan produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang harus diikuti oleh segenap lembaga di daerah.

Menurut pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki fungsi :

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan mengenai struktur APBD yaitu :

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah

Struktur APBD sebagaimana dimaksud diatas diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pengukuran *Value For Money*

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi); dan
- b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik.

Pengukuran efektivitas, efektivitas adalah berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *outcome* dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran belanja dan *output* adalah target anggaran belanja. Berikut kriteria efektivitas :

Kriteria penilaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 90% - 99%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 75% - 89%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif. Dimana penulis secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu di Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2017.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Melakukan observasi pada objek peneliiian.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
3. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menemukan tujuan serta manfaat penelitian.
4. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014-2015.
6. Menyajikan data-data yang telah diolah dalam bentuk laporan akhir penelitian.
7. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tesebut dan memberikan saran-saran pada badan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dimana data tersebut berupa gambaran umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan struktur organisasi. Dan data kuantitatif, berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2014-2015, Yang disajikan dalam bentuk angka.

Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Adapun data yang penulis peroleh melalui :

- Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang di teliti untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan.
- Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Melihat penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya), menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library reserch*) membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti, dan dilihat dari mengakses *website*, situs-situs yang di berkaitan dan dokumen-dokumen terkait masalah yang ingin diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Teknik dokumentasi yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun anggaran 2014-2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Realisasi Anggaran tahun 2014 ini disusun berdasarkan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2014. Jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencakup semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang di tetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya. Dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran sebesar Rp. 11.175.000.000,00 yang terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan masing-masing pendapatan pajak daerah sebesar Rp.2.868.726.175,00., pendapatan retribusi daerah sebesar Rp1.536.000.000,00., Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.0,00., dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 6.770.273.825,00., Keempat jenis pendapatan tersebut tidak mencapai target. Pencapaian anggaran (target) tertinggi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada jenis pendapatan pajak daerah sebesar 96,50% dengan anggaran sebesar Rp. 2.868.726.175,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2.768.430.763,00. Berikut adalah pendapatan transfer, pendapatan transfer terdiri dari 2 (dua) kelompok yang pertama adalah transfer pemerintah pusat dengan anggaran sebesar

Rp.367.004.306.106,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.360.771.305.447,00 dengan jumlah persentase sebesar 98,30%, kedua transfer pemerintah provinsi dengan anggaran sebesar Rp.13.573.000.829,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 8.673.367.472,00 dengan jumlah persentase sebesar 63,91%. Berikut adalah lain-lain pendapat yang sah dengan anggaran sebesar Rp.2.780.000.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2.780.000.000,00. Bisa dilihat dari penjelasan di atas bahwa keseluruhan Anggaran Pendapatan berjumlah Rp.394.532.306.935,00, dengan realisasi sebesar Rp.382.277.320.381,86 dengan jumlah persentase sebesar 96,89%. Berikut adalah rekening Belanja, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang pertama adalah belanja operasi dengan anggaran sebesar Rp.274.043.474.442,75 dan yang terealisasi sebesar Rp.254.850.918.919,00 dengan jumlah persentase sebesar 93,00%. Yang kedua adalah Belanja modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 139.347.212.187,85 dan yang terealisasi sebesar Rp. 133.943.353.039,00 dengan jumlah persentase sebesar 96,12%. Ketiga adalah belanja tak terduga dengan jumlah anggaran sebesar Rp.400.000.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.0,00 atau tidak direalisasikan. Bisa dilihat bahwa keseluruhan jumlah anggaran belanja sebesar Rp.413.790.686.630,60 dengan realisasi sebesar Rp.388.794.271.958,00 dengan persentase sebesar 93,96%. Dengan demikian ditemukan sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.19.258.379.695,60. Meskipun dana yang dianggarkan tidak dapat terealisasi sepenuhnya, tapi pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah dapat menyajikan dan mengungkapkan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menyajikan perhitungan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran. Pos-pos laporan Realisasi Anggaran telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya. Dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran sebesar Rp. 13.150.000.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) jenis pendapatan masing-masing pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 4.035.250.000,00, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 1.382.338.889,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 7.732.411.116,00, ketiga jenis pendapatan tersebut tidak mencapai target. Pencapaian anggaran (target) tertinggi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada jenis pendapatan pajak daerah sebesar 95,83% dengan anggaran sebesar Rp. 4.035.250.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3.867.038.763,00. Berikut adalah pendapatan transfer, pendapatan transfer terdiri dari 4 (empat) kelompok yang pertama adalah transfer pemerintah pusat dengan anggaran sebesar Rp.426.357.740.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.422.158.981.231,00 dengan jumlah persentase sebesar 99,02%, kedua transfer pemerintah pusat – lainnya dengan anggaran sebesar Rp.42.323.014.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 41.353.314.000,00 dengan jumlah persentase sebesar 97,71%, ketiga transfer pemerintah daerah - lainnya dengan anggaran sebesar Rp.13.573.000.829,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.10.141.780.293,00 dengan jumlah persentase sebesar 74,72%, dan yang keempat adalah bantuan keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 namun tidak terealisasi. Berikut adalah lain-lain pendapat yang sah dengan anggaran sebesar Rp.1.680.000.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 678.540.328,00 dengan jumlah persentase sebesar 40,45%. Bisa dilihat dari penjelasan di atas bahwa keseluruhan Anggaran Pendapatan berjumlah Rp.498.183.754.829,00, dengan realisasi sebesar Rp.486.674.200.698,00 dengan jumlah persentase sebesar 97,69%. Berikut adalah rekening Belanja, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang pertama adalah belanja operasi dengan anggaran sebesar Rp.288.480.143.483,66 dan yang terealisasi sebesar Rp.268.950.242.921,00 dengan jumlah persentase sebesar 93,23%. Yang kedua adalah Belanja modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp.178.045.346.100,80 dan yang terealisasi sebesar Rp.172.642.884.243,00 dengan jumlah persentase sebesar 96,97%. Ketiga adalah belanja tak terduga dengan jumlah anggaran sebesar Rp.130.000.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.118.100.000,00 dengan jumlah 90,85%. Bisa dilihat bahwa keseluruhan jumlah anggaran belanja sebesar Rp.466.665.489.584,46 dengan realisasi sebesar Rp.441.711.227.164,00 dengan persentase sebesar 94,65%. Berikut adalah rekening transfer dengan anggaran sebesar Rp.44.269.693.364,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.43.505.425.337,00 dengan jumlah persentase sebesar 98,27%. Dan yang terakhir yaitu rekening pembiayaan dengan Anggaran Sebesar Rp.12.741.428.119,46 dan yang terelisasi sebesar Rp.12.741.428.119,46. Dengan demikian ditemukan sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.14.198.976.316,46. Meskipun dana yang dianggarkan tidak dapat terealisasi sepenuhnya, tapi pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah dapat menyajikan dan mengungkapkan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik.

Pembahasan**Efektifitas Anggaran Pendapatan**

Analisis Rasio Efektifitas Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015 bisa dilihat dari perhitungan di bawah :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp. 382.277.320.381,86}}{\text{Rp. 394.532.306.935,00}} \times 100\% \\ &= 96,89\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2014 telah efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan daerahnya.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp. 486.674.200.698,00}}{\text{Rp. 498.183.754.829,00}} \times 100\% \\ &= 97,69\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2015 telah efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan daerahnya.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

| Tahun | Anggaran | Realisasi | (%) | Kriteria |
|-------|--------------------|--------------------|-------|----------|
| 2014 | 394.532.306.935,00 | 382.277.320.381,86 | 96,89 | Efektif |
| 2015 | 498.183.754.829,00 | 486.674.200.698,00 | 97,69 | Efektif |

Pada tabel diatas merupakan hasil penelitian pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2014-2015 tentang efektifitas realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (berupa Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah). Bisa kita lihat bahwa ada peningkatan realisasi di tahun 2015, walaupun belum mencapai target yang di anggarkan tapi pemerintah daerah telah berusaha untuk memperbaiki tingkat realisasinya pada tahun 2015. Selama periode 2014-2015 tingkat efektifitas pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 0,8% di tahun 2015. Jadi realisasi pendapatan daerah 2014 dan 2015 sudah bisa dikatakan efektif karena sudah mencapai kisaran presentasi 90%.

Efektifitas Belanja Daerah

Rasio Efektifitas Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014-2015 bisa dilihat dari perhitungan di bawah :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp. 388.794.271.958,00}}{\text{Rp. 413.790.686.630,60}} \times 100\% \\ &= 93,96\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2014 telah efektif dalam merealisasikan Belanja Daerahnya karena realisasi belanja daerah tidak melebihi apa yang telah di targetkan oleh Pemerintah Daerah.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp. 441.711.227.164,00}}{\text{Rp. 466.665.489.584,46}} \times 100\% \\ &= 94,65\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2015 telah efektif dalam merealisasikan Belanja Daerahnya karena realisasi belanja daerah tidak melebihi apa yang telah di targetkan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2 Tingkat Efektivitas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

| Tahun | Anggaran | Realisasi | (%) | Kriteria |
|-------|--------------------|--------------------|-------|----------|
| 2014 | 413.790.686.630,60 | 388.794.271.958,00 | 93,96 | Efektif |
| 2015 | 466.665.489.584,46 | 441.711.227.164,00 | 94.65 | Efektif |

Pada tabel diatas merupakan hasil penelitian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur periode Tahun 2014-2015 tentang realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung). Pemerinta Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

sudah dikatakan baik dalam merealisasi belanja daerahnya. Dilihat dari realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak melebihi dengan jumlah yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Persentase tahun 2014 sebesar 93,96% dan tahun 2015 sebesar 94,65%. Selama periode 2014-2015 tingkat efektifitas belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,69% di tahun 2015.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki kriteria efektifitas yang meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015. Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Mengatakan bahwa APBD yang cukup jauh perbedaannya dengan yang diharapkan disebabkan oleh adanya kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak direalisasikan. Namun untuk kegiatan yang lain yang telah dianggarkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah melaksanakannya secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014-2015 sudah dikatakan efektif karena sudah mencapai kriteria persentase 90%.
2. Selama periode 2014-2015 tingkat efektifitas pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 0,8% di tahun 2015. Dan tingkat efektifitas belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,69% di tahun 2015
3. Realisasi Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara umum dapat dikatakan baik karena tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Ini berarti kinerja belanja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dikatakan terealisasi dengan baik.
4. Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2014 – 2015 berlangsung sangat efektif dengan memberikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjalankan tanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan melalui Badan Keuangan Daerah cukup baik dan relatif tercapai setiap targetnya.
5. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah berpedoman pada Undang-undang Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar.

Saran

Bedasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta pengembangan potensi-potensi baru yang ada di daerah.
2. Diharapkan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten Di bidangnya masing-masing.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus meningkatkan kinerja pengelolaan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, agar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mampu mempertahankan opini audit pada laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

Aluy, Claudia Aprilinda, Tulung, Joy Elly dan Tasik, Hizkia HD. 2017. Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Manajemen Puncak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Bum Dan Bank Swasta Nasional Devisa Di Indonesia). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. Vol. 5 No. 2

Badan Keuangan Daerah. 2016. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2015. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Harahap, Sofyan Safitri. 2013. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta; Raja Grafindo Persada

Hery, 2012. Analisis Laporan Keuangan, jakarta; Bumi Aksara.

Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta

Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta; Andi

Poyoh, Christin Marciah., Murni, Sri dan Tulung, Joy Elly. 2017. Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. Vol 5 No. 2

Rosmeri Elsy., Suwanda Dadang., & Muchidin Umuh,. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi Akruial Pemerintah Daerah, Jatinangor; Ghalia Indonesia.

Sugiyono, 2016. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung; Alfabeta

Sujarweni, Wiratna. 2015. Sistem Akuntansi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Nordiawan Deddi, Iswahyudi, Maulidah. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta; Salemba Empat

Husnul Abdi, 2016. Analisis Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Universitas Islam Banjarmasin. Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Edisi Januari-Juni 2016. Vol 5, No.1, ISSN 2541-178X

Hartanti Devianingsih and Dhiana Ekowati. 2011. "Regional Revenue And Expenditure Budget Yogyakarta City Government Fiscal Year 2009-2010". ISSN- 1411 – 3880

Korompot, Riska. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal 841-848 ISSN 2303-1174

Sumenge Ariel. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol.1 No.3. ISSN 2303-1174 Universitas Sam Ratulangi

Tulung, Joy Elly & Ramdani, Dendi. 2016 "The influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance" *International Research Journal of Business Studies*, Volume 8 Nomor 3.

Tulung, Joy Elly, 2012. Top Management Team and Company Performance in Big Countries vs Small Countries. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, Volume 15, No. 1, April 2012, pages 59 – 70